

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN KERINCI

ARIEF BIMANTARA, S.AP
VIVI HERLINA, S.IP., S.E., M.M, HELMI EDISA, S.E., M.M

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

ariefbimantara20@gmail.com

viviherlina124@gmail.com

helmiedisa@gmail.com

ABSTRACT

Title, Effect of Regional Financial Management on Regional Economic Performance in Kerinci Regency. This research took place at the Office of the Regional Finance and Revenue Management Agency (BPKPD), with the formulation of research problems. 1. Is there any influence of Regional Financial Management on Regional Economic Performance in Kerinci Regency 2. How big is the influence of Regional Financial Management on Regional Economic Performance in Kerinci Regency. Research objectives: 1. To determine the effect of Regional Financial Management on Regional Economic Performance in Kerinci Regency 2. To determine the magnitude of the influence of Regional Financial Management on Regional Economic Performance in Kerinci Regency. This research uses a quantitative approach where data is obtained through a field questionnaire to 42 respondents who refer to the variable research indicators (X) Regional Financial Management to the variable (Y) Regional Economic Performance. The data obtained in the field were analyzed based on the formula, Simple Linear Regression to see the effect of variable X on variable Y. KD (coefficient of determination) to see the magnitude of the influence between variable X and variable Y. From the research results it is known that Regional Financial Management has an effect on Regional Economic Performance amounted to 26.7%. For this reason, the authors suggest that Regional Financial Management can be improved so that Regional Economic Performance is more effective and efficient.

Keywords: Regional Financial Management, Regional Economic Performance

ABSTRAK

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dengan rumusan masalah penelitian. 1. Apakah ada pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Kerinci 2. Berapakah besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Kerinci. Tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Kerinci 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data diperoleh melalui kuesioner dilapangan kepada 42 orang responden yang mengacu kepada indikator penelitian variabel (X) Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap variabel (Y)

Kinerja Ekonomi Daerah. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis berdasarkan rumus, Regresi Linear Sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. KD (Koefisien Determinasi) untuk melihat besarnya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Ekonomi Daerah sebesar 26,7%. Untuk itu penulis menyarankan agar Pengelolaan Keuangan Daerah dapat ditingkatkan agar Kinerja Ekonomi Daerah semakin efektif dan efisien.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Ekonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota (Bratakusumah, 2001 dalam Maryati, 2010). Mulyono (2006) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mardiasmo (2012) memberikan pengertian fungsi pengelolaan keuangan adalah menyangkut keputusan investasi, pembiayaan dan deviden untuk suatu organisasi. Fungsi-fungsi ini harus sama dilaksanakan dalam organisasi bisnis, bidang pemerintah, maupun organisasi-organisasi.

Otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri Menurut Oates (1993) dalam Sasana (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya.

Menurut Halim (2004:31), pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Saragih dalam Sularso (2011:45) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Halim (2004:31) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Sidik dalam Maryati (2007:39), menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Halim (2004:31), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah pendapatan atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2007:62) juga menyatakan menyatakan hal sama. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang diperoleh melalui pengamatan sementara dilapangan diduga:

1. Belum transparannya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja ekonomi belum terlaksana dengan baik dan maksimal
2. Belum maksimalnya tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah terhadap perkembangan kepada ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan merata
3. Belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Kerinci

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Di Kabupaten Kerinci.”**

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Apakah ada pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci?
2. Berapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci?

1.2. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap pihak masyarakat pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah sehingga pemerintah Kabupaten Kerinci dapat mengelola keuangan dengan baik dan maksimal.

1.4.2. Manfaat Akademis

Dapat memberikan manfaat kepada penulis dalam memberikan referensi pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian dan guna memenuhi syarat mutlak untuk memenuhi kewajiban akademis peneliti serta dapat memberikan sumbangan pemikiran secara tertulis sehingga dapat digunakan oleh pihak lain yang ingin mengkaji obyek yang sama.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada umumnya untuk memperoleh tingkat perkembangan karyawan yang setinggi-tingginya, hubungan kerja yang serasi diantara para karyawan dan penyatu paduan sumber daya manusia diharapkan akan meningkatkan produktifitas kerja. Untuk Itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Menurut Sugiarto,(2007:45), manfaat penerapan manajemen sumber daya manusia akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan pengorganisasian antara lain:

1. Organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat.
2. Organisasi atau perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan atau jabatan berupa deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan atau jabatan yang terkini.
3. Organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan bisnis.
4. Organisasi atau perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja.
5. Dapat melakukan kegiatan orientasi sosialisasi secara terarah.
6. Dapat melaksanakan pelatihan secara efisien dan efektif.
8. Dapat melaksanakan penilaian karya secara efektif dan efisien.
9. Dapat melaksanakan program pembinaan dan pengembangan karir sesuai kondisi dan kebutuhan.
10. Dapat melakukan kegiatan penelitian.
11. Dapat menyusun skala upah atau gaji dan mewujudkan sistem balas jasa bagi para pekerja.

1.5.2. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2012, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim dan Salim, 2012:534).

Menurut Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

1.5.3. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
 2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan.
- Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran-

sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

1.5.4. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemerintah negara yang meliputi proses: penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen obyektif pembicaraan kebijakan publik.

Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik pada hakikatnya menyangkut pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat (to do or not to do) maka keuangan daerah secara manajerial dalam lingkup kebijakan publik menyangkut suatu pilihan bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas finansial. Langkah pemerintah melalui perangkat hukum menjadi sesuatu yang penting dalam penentuan arah kebijakan keuangan.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut, Keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

1.5.5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105/2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab.
2. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
3. Daerah dapat membentuk dana cadangan.
4. Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain.
5. Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan optimalisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

3. Value for money adalah mengandung arti menerapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1.5.6. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan pengelolaan keuangan daerah sangat vital. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2012:106) adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (accountability)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus ditata dan dikelola dengan baik dan sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan oleh APBD tiap-tiap daerah.

3. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan betul-betul jujur, dapat dipercaya sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan sehingga memiliki hasil yang berguna bagi masyarakat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah ini sedapat mungkin dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Para aparat pengelolah keuangan daerah, DPRD selaku pengawasan legislatif, petugas pengawasan intern yang dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kabupaten/kota dan petugas pengawasan ekstern yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan pengendalian dan pengawasan agar semua tujuan pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat tercapai.

1.5.7. Kinerja

Sebuah organisasi memerlukan manusia sebagai sumber daya pendukung utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan turut memajukan organisasi sebagai suatu wadah peningkatan produktivitas kerja. Kedudukan strategis untuk meningkatkan produktivitas organisasi adalah pegawai, yaitu individu-individu yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan.

Faktor kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa banyak karyawan-karyawannya berkarya dan mempergunakan informasi tersebut guna memastikan bahwa pelaksanaan kerja memenuhi standar-standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Untuk mengetahui kinerja karyawan dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah alat yang bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan mePengelolaan Keuangan Daerah karyawan. Pada intinya penilaian kinerja dapat dianggap

sebagai alat untuk memverifikasi bahwa individu-individu memenuhi standar-standar kinerja yang telah ditetapkan.

1.5.7.1. Tolak Ukur Kinerja

Mutu kerja karyawan secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Guna mendapatkan kontribusi karyawan yang optimal, manajemen harus memahami secara mendalam strategi untuk mengelola, mengukur dan meningkatkan kinerja, yang dimulai dengan terlebih dahulu menentukan tolak ukur kinerja. Ada beberapa syarat tolak ukur kinerja yang baik menurut Bestira, (1998:43), yaitu :

1. Tolak ukur yang baik haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya. Konsep keandalan pengukuran mempunyai dua komponen; stabilitas dan konsistensi.
2. Tolak ukur yang baik harus mampu membedakan individu-individu sesuai dengan kinerja mereka. Salah satu tujuan penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja anggota organisasi.
3. Tolak ukur yang baik harus sensitif terhadap masukan dan tindakan-tindakan dari pemegang jabatan. Karena tujuan penilaian kinerja adalah untuk menilai efektivitas individu-individu anggota organisasi, kriteria efektivitas yang dipakai harus dapat digunakan semua individu di dalam organisasi.
4. Tolak ukur yang baik harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa orang-orang yang kinerjanya sedang diukur merasa bahwa tolak ukur yang digunakan memberi petunjuk yang akurat dan adil mengenai kinerja mereka.

1.5.7.2. Aspek-aspek Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja pegawai, maka harus ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi. Pengukuran kinerja tersebut mencakup indikator-indikator pencapaian kinerja. Pengukuran pekerjaan menurut Gibson et. al. (1995:89) dapat dilakukan berdasarkan waktu :

1. Jangka Pendek :
 - 1) Produksi
 - 2) Kualitas/mutu
 - 3) Efisiensi dan fleksibilitas
2. Waktu jangka menengah :
 - 1) Persaingan
 - 2) Pengembangan
3. Jangka panjang adalah merupakan kelangsungan hidup suatu organisasi.

1.5.7.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja atau *performance indicators* kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja. Indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atau dasar perilaku yang dapat diamati. Menurut Wibowo (2007:76) Terdapat tujuh indikator kinerja :

1. Tujuan
Merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seseorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan
2. Standar

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai.

3. Umpan balik
Umpan balik melaporkan kemajuan baik kualitas maupun kuantitas. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja dan pencapaian tujuan
4. Alat atau sarana
Merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses, yang merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya
5. Kompetensi
Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan
6. Motif
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu
7. Peluang
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Mereka secara efektif membutuhkan kesempatan untuk memenuhi syarat untuk usia berprestasi.

1.5.8. Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (2010: 373) dari tinjauan aspek ekonomi daerah mempunyai 3 definisi, yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain tercermin dari segi pendapatan per kapitanya, sosial-budayanya, geografisnya, dan lain sebagainya. Daerah dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu “ruang ekonomi” yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah nodal.
3. Suatu daerah adalah suatu “ruang ekonomi” yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi, daerah disini didasarkan atas pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

II. METODE PENELITIAN

2.2. Metodologi Penelitian

2.2.1. Pendekatan Penelitian Yang Digunakan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan suatu penelitian.

Penelitian kuantitatif adalah: Penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tujuan

penelitian kuantitatif adalah: Mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya.

2.2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Merupakan mencari landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini yang bersumber dari literatur, buletin-buletin, materi kuliah dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan, wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden.

2.2.3. Populasi dan Sampel

Sugiono (2006:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang dimaksud Selanjutnya dijelaskan bahwa sampel adalah: Sebagian dari jumlah populasi yang ada atau sebagian individu yang dijadikan responden dari keseluruhan individu yang terdapat dalam populasi.

Sugiono (2006:92) menyatakan bahwa apabila subjek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil semuanya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Sampel jenuh, yaitu dengan mengambil seluruh jumlah populasi untuk dijadikan responden.

2.2.4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah: pegawai pada Badan pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.

2.2.5. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah: Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau diperoleh dari pihak ketiga berupa gambaran umum objek penelitian, dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Data Primer

Data primer adalah: Data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dijadikan sampel dengan cara menyebarkan kuisisioner.

2.2.6. Teknik Analisis

Agar hasil yang diperoleh lebih baik dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut, Sugiono (2006:19)

1. Skala likert

Menurut Sugiono (2006:107) Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya indikator variabel dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item pertanyaan dijabarkan dalam bentuk gradasi dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Sangat setuju (SS) | diberi skor 5 |
| Setuju (ST) | diberi skor 4 |
| Kurang setuju (KS) | diberi skor 3 |
| Tidak setuju (TS) | diberi skor 2 |
| Sangat tidak setuju (STS) | diberi skor 1 |

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Validitas instrument adalah: Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai dengan instrument yang digunakan. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Rumus yang digunakan mengacu pada Sugiyono (2006:141).

Uji Reliabilitas

Sugiyono (2006:147) menyatakan bahwa Instrument yang reliabel adalah: Instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecenderungan penggunaan instrument penelitian yang sama dan hasil yang sama pula pada waktu yang berbeda.

Berdasarkan pendapat Sekaran (2012:42), jika hasil perhitungan reliabilitas kurang dari 0,6 maka item yang digunakan kurang baik. Sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3. Regresi Linier Sederhana

$$Y = a + bX + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

| | |
|---|-------------------------------|
| Y | = Kinerja |
| a | = Konstanta |
| b | = Koefisien korelasi |
| X | = Pengelolaan Keuangan Daerah |
| e | = error |

Untuk mendapatkan hasil perhitungan agar lebih valid dan akurat, maka proses penghitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS VERSI 20.

4. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah, maka dihitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

| | |
|----|-------------------------|
| Kd | = Koefisien determinasi |
| r | = Koefisien korelasi |

5. Uji t-hitung

Untuk menguji hipotesis yang diajukan secara parsial dalam penelitian ini, maka dilakukan perhitungan terhadap t-hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t-tabel, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5 \%$ atau 0,05. Uji dua arah dengan $df = N-2$.

Kriteria :

Jika $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci.

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci.

1.8.7. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 ; $r = 0$: diduga tidak terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci.

H_a ; $r \neq 0$; diduga terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci.

2.2.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah: Di Kabupaten Kerinci dengan subjek penelitian adalah pegawai di Kantor Badan pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 orang Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Kerinci, dimana karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 di bawah ini.

3.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|----|---------------|--------|-------|
| 1 | Laki-Laki | 32 | 76,20 |
| 2 | Perempuan | 10 | 23,80 |
| | | 42 | 100 % |

Sumber : BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 3.1. dapat disimpulkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 76, 20 % dan perempuan 23,80%.

3.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah | % |
|----|------------|--------|-------|
| 1 | S3 | 1 | 2,38 |
| 2 | S2 | 8 | 19,05 |
| 3 | S1 | 32 | 76,19 |
| 4 | D3 | 1 | 2,38 |
| | | 42 | 100 % |

Sumber : BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2020

Berdasarkan data dari tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa, rata-rata pendidikan responden adalah S2 yaitu sebanyak 76,19 %. Dengan demikian berarti pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Kerinci sudah memiliki pengetahuan

yang sangat baik karena mayoritas pegawainya secara pendidikan sudah memiliki tingkat pendidikan S1.

3.2. Analisis Data

3.2.1 Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 20, dari penyebaran kuesioner yang terkumpul adalah 42 responden. Untuk melakukan akurasi data yang digunakan tentunya sangat dibutuhkan dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Untuk itu perlu dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel yang digunakan (dijabarkan berupa item-item pertanyaan dalam kuesioner) valid atau tidak. Validitas berhubungan dengan kenyataan. Valid suatu kuesioner penelitian berarti mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam penelitian tersebut.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi 19.00 dengan syarat nilai dari uji validitas dengan cara nilai signifikansi $\leq 0,05$ (Ghozali:2008:16). Hasil pengujian validitas data dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Hasil Pengujian Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X)

| No | Pertanyaan | Pearson Correlation | Sig hitung | Kesimpulan |
|----|------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 1 | 0,446 | 0,003 | Valid |
| 2 | 2 | 0,375 | 0,003 | Valid |
| 3 | 3 | 0,334 | 0,003 | Valid |
| 4 | 4 | 0,700 | 0,003 | Valid |
| 5 | 5 | 0,654 | 0,003 | Valid |
| 6 | 6 | 0,692 | 0,003 | Valid |
| 7 | 7 | 0,615 | 0,003 | Valid |
| 8 | 8 | 0,709 | 0,003 | Valid |
| 9 | 9 | 0,728 | 0,003 | Valid |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3.3 di atas maka dapat dilihat bahwa semua item pada variable Pengelolaan keuangan daerah (X) dinyatakan valid. Hasil untuk pengujian validitas variabel Kinerja ekonomi Daerah (Y) dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja Ekonomi Daerah (Y)

| No | Pertanyaan | Pearson Correlation | Sig hitung | Kesimpulan |
|----|------------|---------------------|------------|------------|
|----|------------|---------------------|------------|------------|

| | | | | |
|----|----|-------|-------|-------|
| 1 | 1 | 0,469 | 0,003 | Valid |
| 2 | 2 | 0,428 | 0,003 | Valid |
| 3 | 3 | 0,570 | 0,003 | Valid |
| 4 | 4 | 0,670 | 0,003 | Valid |
| 5 | 5 | 0,653 | 0,003 | Valid |
| 6 | 6 | 0,513 | 0,003 | Valid |
| 7 | 7 | 0,628 | 0,003 | Valid |
| 8 | 8 | 0,724 | 0,003 | Valid |
| 9 | 9 | 0,818 | 0,003 | Valid |
| 10 | 10 | 0,764 | 0,003 | Valid |
| 11 | 11 | 0,585 | 0,003 | Valid |
| 12 | 12 | 0,706 | 0,003 | Valid |
| 13 | 13 | 0,738 | 0,003 | Valid |
| 14 | 14 | 0,671 | 0,003 | Valid |
| 15 | 15 | 0,731 | 0,003 | Valid |
| 16 | 16 | 0,706 | 0,003 | Valid |
| 17 | 17 | 0,810 | 0,003 | Valid |
| 18 | 18 | 0,438 | 0,003 | Valid |
| 19 | 19 | 0,738 | 0,003 | Valid |
| 20 | 20 | 0,671 | 0,003 | Valid |
| 21 | 21 | 0,731 | 0,003 | Valid |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk pengujian validitas variabel Kinerja Ekonomi Daerah (Y) semua data dinyatakan valid.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2008:42) uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauhmana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama, atau disebut *internal consistency reliability*.

Pada penelitian ini, uji reliabiliti alat ukur yang akan digunakan adalah dengan menggunakan *cronbach alpha*. Menurut Ghazali (2008:42) Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* > 0,60. Hasil pengujian reabilitas data dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Item | Cronbach's alpha |
|----|-------------------|------|------------------|
| 1 | Kinerja (X) | 21 | 0,858 |
| 2 | Produktivitas (Y) | 9 | 0,888 |

Sumber : Data diolah

Dari hasil pengujian reliabilitas, ternyata koefisien alphanya lebih besar dari 0,6 berdasarkan kriteria alpha. Dengan demikian semua item variabel yang ada didalam kuesioner dinyatakan reliabel.

3.2.3. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Kerinci

Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci yaitu menggunakan persamaan analisis regresi linear sederhana dengan variabel bebas (*independent*) Pengelolaan Keuangan Daerah (X) dan variabel terikat (*dependent*) kinerja (Y). Untuk mengetahui hasil analisis, maka dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah (X) Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah (Y)
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 58,492 | 9,246 | | 6,326 | ,000 |
| | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | ,974 | ,255 | ,517 | 3,820 | ,000 |

a. Dependent Variable: KINERJA EKONOMI DAERAH

Dari tabel 3.6. di atas dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 58,492 + 0,974 X$

Koefisien regresi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah adalah positif. Maksudnya semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka ada kecenderungan semakin tinggi kinerja ekonomi daerah. Jika skor pengelolaan keuangan daerah ditingkatkan satu satuan, maka secara rata-rata skor kinerja ekonomi daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,974 satuan.

Konstanta sebesar 58,492 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X) maka kinerja ekonomi daerah adalah sebesar 58,492 satuan.

Tabel 3.7
Hasil Analisis Besarnya Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah (X) Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah (Y)

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,517 ^a | ,267 | ,249 | 8,00269 |

a. Predictors: (Constant), PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan analisis tabel 3.7 terdapat *R square* (Determinasi) adalah 0,517 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi 0,267) *R square* dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 26,7% kontribusi variabel pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah, sedangkan sisanya sebesar 73,3% dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

3.3.4. Uji t

untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial maka digunakan uji t, pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Hasil Ringkasan Uji t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 42,544 | 11,674 | | 3,644 | ,001 |
| PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | ,896 | ,247 | ,476 | 3,621 | ,001 |

a. Dependent Variable: KINERJA EKONOMI DAERAH

Berdasarkan tabel 3.8 dari uji t ternyata didapat: $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $3,621 \geq 2,02108$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci

Untuk menguji signifikan pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci dengan menggunakan uji t dengan hipotesis:

$H_0 : r = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci.

$H_a : r \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci.

Dengan dasar pengambilan keputusan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , sebagai berikut :

$t_{hitung} \geq t_{tabel}$: Hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci.

$t_{hitung} < t_{tabel}$: Hipotesa nol diterima dan hipotesa alternatif ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci ini dibuktikan dengan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $3,621 \geq 2,02108$.
2. Besarnya pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci sebesar 26,7%, sedangkan sisanya sebesar 73,3% dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Tanpa mengurangi rasa hormat dan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku, dan seluruh keluargaku yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil, mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a restu yang telah diberikan untuk penulis.
2. Ibu Vivi Herlina, S.IP.,S.E., M.M selaku Pembimbing Utama dan Bapak Helmi Edisa, S.E., M.M selaku Pembimbing pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Murlinus, S.H., M.H selaku Ketua STIA-NUSA Sungai Penuh.
4. Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Kerinci dan pegawai yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti.
5. Bapak Ibu Dosen STIA-NUSA Sungai Penuh yang telah mendidik serta membagi ilmunya dengan penulis sehingga sampai ketahap penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James, J.M Ivancevic dan J.H Donnely. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi kedelapan Jilid I.Terjemahan Nunuk Adiami. Binarupa Aksara .Jakarta
- Irawan Prpendapatan ya, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, STIA- LAN Press
- Mangkunegara. A.A. Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Rosda Karya.Bandung
- Manulang, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Agung. Jakarta
- Mubyarto, 2007. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES. Muhaimin. Susilo. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Marwansyah dan Mukaram, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2012. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah*.Yogyakarta.

- Marsono. 2005. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2. 2005
- Mondy, R. Wayne, Noe Robert M. 2003. *Human Resource Management fourth edition*. Library of Congress Catalog : US.
- Nawawi. 2008, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Rahman Abul Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Rahmanto .2001. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Riduwan. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Cetakan Ketiga. CV. Alfabeta Bandung.
- Simamora. Henr. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Andi Karya Yogyakarta
- Siagian, Sondang. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif da kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Timpe. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rhineka Cipta. Jakarta
- Williams. 2012. *Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Optimalisasi Jangka Panjang*. Jakarta. PT. Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah